

RENJA **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

TAHUN 2024



dpmptsp

KAB. PINRANG

TA. 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Akhir Perangkat Daerah (RANHIR PD) Tahun Anggaran 2024.

Rencana Akhir Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RANHIR PD DPMPTSP) Kabupaten Pinrang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 sesuai tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada program dan kegiatan Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2023.

Rencana Akhir (RANHIR) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program / Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Disamping itu RANHIR berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Akhir (RANHIR) PD 2024 menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara transparan, cepat dan mudah sebagai perwujudan e Governance secara umum serta memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bagi masyarakat dan pelaku usaha pada khususnya.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan laporan Rencana Akhir Perangkat Daerah (RANHIR PD) tahun 2024 ini.

Pinrang, 2023
Kepala Dinas

ANDI MIRANI, AP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19740603 199311 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP (DPMPTSP)		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....		10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		38
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD		42
2.5 Penelaahan Dokumen Perencanaan Bidang Teknis Terkait		51
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PINRANG		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah		54
3.3 Program dan Kegiatan		57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	71
BABV PENUTUP		
5.1 Catatan Penting		78
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan		78
5.3 Rencana Tindak Lanjut		79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024	Hal.23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang 2021-2024	Hal.31
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Perangkat Daerah	Hal.44
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	Hal.55
Tabel 3.2	Tujuan,Sasaran dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024	Hal.57
Tabel 3.3	Rencana Program, Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang	Hal.63
Tabel 4.2	Rencana Kerja dan Pendaanaan Indikatif Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	Hal.71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Akhir Perangkat Daerah (RANHIR PD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Tahun 2024, disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan publik, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pinrang, Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang.

Rencana Akhir (RANHIR) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk tahun ke 5 (lima) periode RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019 – 2024 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang. RANHIR DPMPTSP memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian Kerja, pengorganisasian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menyusun RANHIR PD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Renstra

OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Akhir (RANHIR) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Akhir Perangkat Daerah (RANHIR PD). Dalam rangka penyusunan RANHIR perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan. RANHIR perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

1.1. Pengertian RANHIR Perangkat Daerah

Rencana Akhir (RANHIR) PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Proses Penyusunan RANHIR PD

Rencana Akhir Perangkat Daerah (RANHIR PD) merupakan Dokumen perencanaan secara menyeluruh yang dibuat setiap tahunnya yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Rencana Akhir Perangkat Daerah (RANHIR PD) DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2024 landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (Covid 19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penanggaran pembangunan nasional;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);`
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
- 16) Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

- 23) Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024;
- 29) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 31) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 – 2019 ;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana
- 38) Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);

- 39) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 – 2019 ;
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 12);
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Penyusunan JangkaMenengah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8);
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pinrang.
- 44) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pinrang.
- 45) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita daerah kabupaten Pinrang Nomor 27 tahun 2020);
- 46) Revisi Rencana Startegis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019-2024;
- 47) Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024tentang RKPD menunggu penetapan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- Sebagai dasar/pijakan dan rujukan dalam menyusun RKA-PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2024;
- Dokumen RANHIR-PD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2024 harus bersinergis dengan RPJP Kabupaten Pinrang 2019-2029, RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024, Perubahan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024;
- Sebagai suatu dokumen perencanaan untuk referensi penilaian tahunan terhadap hasil capaian Kerja tahun sebelumnya;
- Menyiapkan kerangka evaluasi Kerja bagi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

- Menjadi acuan bagi Dinas PMPTSP dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024;
- Membangun konsistensi perencanaan dalam perwujudan capaian Kerja Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasa;
- Mewujudkan pencapaian sasaran Perangkat Daerah;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta prioritas dan Plafond Anggaran Sementara 2024 PD.
- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan bagian dan bidang melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- Menjadi acuan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RANHIR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Rencana Akhir Perangkat Daerah;

Bab II Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Akhir (RANHIR) Perangkat Daerah tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas PMPTSP tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Awal Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 serta mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Bab III menelaah kebijakan nasional yang terkait Dinas PMPTSP yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab IV membuat uraian dan tabel Rencana Akhir serta pendanaan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang.

Bab V Penutup yang menjelaskan tentang catatan penting dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Akhir (RANHIR) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD yang akan dilaksanakan. Dalam dokumen Rencana Akhir, tertuang tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Akhir yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan / program dan kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pelayanan perizinan usaha, perizinan non usaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pinrang. Sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan pada 4 (empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja DPMPTSP Tahun 2021 dapat direalisasikan dengan predikat nilai capaian 100% atau tercapai sesuai dengan target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis dapat diuraikan berdasarkan akuntabilitas kinerja dan realisasi fisik anggaran dibawah ini :

- a. **Sasaran strategis 1 (pertama) Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja yang terdiri dari indikator *Nilai LKjIP* dengan target 73 (BB) realisasinya 73 atau capaiannya 100% dan Nilai RB dengan target 73 realisasinya 73 atau capaiannya 100 %** adapaun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang jumlah total anggarannya Rp.34.803.900 realisasinya Rp.34.797.300 atau capaiannya 99,98% dengan sumber dana DAU yang terdiri dari 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang jumlah total anggarannya Rp,34.803.900 realisasinya Rp.34.797.300 atau capaiannya 99,98%, dengan sumber dana DAU yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang jumlah total anggarannya Rp. **3.214.820.307** realisasinya Rp. **3.398.119.000** atau capaiannya 99,15% dengan sumber dana DAU yang terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD,3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang jumlah total anggarannya Rp. **11.700.000** realisasinya Rp. **11.700.000** atau capaiannya 100% dengan sumber dana DAU yang terdiri dari Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD,4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang jumlah total anggarannya Rp. **82.035.000** realisasinya Rp. **81.835.000** atau capaiannya 99,76% dengan sumber dana DAU yang terdiri 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah total anggarannya Rp. **158.939.000** realisasinya Rp. **158.927.858** atau capaiannya 99,99% dengan sumber dana DAU yang terdiri 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah total anggarannya Rp. **551.030.000** realisasinya Rp. **294.469.544** atau capaiannya 99,09% yang terdiri 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah total anggarannya Rp. **297.184.400** realisasinya Rp. **294.469.544** atau capaiannya 99,09% dengan sumber dana DAU yang terdiri 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah
- b. total anggarannya Rp. **129.375.500** realisasi Rp. **126.223.216** atau capaiannya 97,56% dengan sumber dana DAU yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- c. **Sasaran strategis 2 (Kedua) yaitu** Meningkatnya aspek legalitas perizinan **melalui indikator kinerja** pertama yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) capaiannya 94,86% Adapun program dan kegiatan penunjang sehingga target dapat terealisasi yaitu dengan 1) Program Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp.15.675.000 realisasi anggaran Rp. 15.675.000 dengan capaian 100% dengan sumber dana DAU dan indikator kinerja yang kedua yaitu Jumlah Investasi PMDN dan PMA yang melalui indikator Perizinan Usaha capaiannya 220% dan Perizinan Non Usaha yang capaiannya 96%. Adapun program dan kegiatan penunjang sehingga target dapat terealisasi yaitu dengan 1) Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang jumlah total anggarannya Rp. **181.182.000** realisasinya Rp. **176.684..100** atau capaiannya 97,52% dengan sumber dana DAU yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan

dan Non Perizinan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan rata-rata capaiannya 99,95%.

- d. **Sasaran strategis yang 3 (ketiga) yaitu Meningkatkan Penanaman Modal** melalui indicator Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri target 2133 proyek realisasinya 6857 proyek capaiannya 321% dan Jumlah Proyek Penanamn Modal Asing (PMA) dari target 5 proyek realisasinya 5 proyek capaiannya 100% serta Indikator Jumlah Tenaga Kerja target capaiannya 414% 1) Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang jumlah total anggarannya Rp. **181.182.000** realisasinya Rp. **176.684..100** atau capaiannya 97,52% dengan sumber dana DAU yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan rata-rata capaiannya 99,95%,
- e. **Sasaran strategis yang 4 (keempat) yaitu Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal** melalui indicator pertama yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) dengan target RP. 1.852.212.257.574 realisasinya Rp.1.861.142.147.835 capaiannya 100% dan Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) target US\$ 137.772.692 realisasi US\$ 63.278.689 capaiannya 48% tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan penunjang sehingga target dapat terealisasi yaitu dengan 1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Adapun kegiatan penunjang sehingga target dapat terealisasi yaitu dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran Rp.379.093.000 realisasi anggarannya Rp.359.062.000 capaiannya 94,72 % dengan sumber dana DAU dan DAK Non Fisik, yang terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dari empat (4) sasaran strategis telah direncanakan dan sepuluh (10) indikator kinerja yang ditergetkan dapat disimpulkan bahwa **6 (enam) indikator** yang melebihi target dengan kategori **sangat baik** dan **2 (dua) indikator** yang tidak mencaopai target dengan kategori **Baik**, semuanya mendapatkan pencapaian kinerja kategori **Sangat Baik**. Dengan demikian pencapaian indikator kinerja tahun 2021 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan walaupun dalam kondisi Pandemi Covid 19 peningkatan pelayanan bagi masyarakat dpat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan. Namun walaupun pencapaian kinerja dapat dicapai dengan kategori **Sangat Baik** masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi dan dimonitoring secara bertahap, sehingga pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan ditahun berikutnya. Adapun rencana yang akan dilakukan dalam mempertahankan pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik
2. Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pembangunan Drive THRU Perizinan
3. Melakukan inovasi kerjasama investasi melalui Forum Investor melalui Forum Investasi Pinrang (FIP) di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten
4. Peningkatan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring baik tenaga kerja lokal dan utamanya bagi para tenaga kerja asing.

5. Peningkatan kerjasama dengan pihak perbankan dan BUMN serta BUMD melalui CSR.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring bagi Tim Percepatan Investasi
7. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang.
8. Memberikan Reward bagi para pengusaha yang taat memasukkan Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM)
9. Memberikan Reward dan punishment bagi ASN yang berprestasi.
10. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis
11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan.
12. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
13. Peningkatan proses pelaksanaan perencanaan, promosi, kerjasama dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal mengalami Croscutting Anggaran Pandemi Covid-19 atau Recofusing anggaran sebesar Rp.5.516.365.725 dari pokok anggaran DAU sebesar Rp.2.200.000.000 , anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik yaitu Rp. 322.573.003 dan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 2.993.792.725. namun dalam pencapaian realisasi fisik dan keuangan dapat dilakbakan sesuai dengan Rencana Alokasi Kegiatan.

Adapun perubahan program dan kegiatan yang mengalami Croscuting adalah:

- Tidak terselenggaranya Pameran Investasi karena masih dalam kondisi Pandemi Covid 19 kemudian anggarannya di anggarkan pada Pembangunan Mal Pelayanan Publik serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang bertujuan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin dan peningkatan realisasi investasi,

Untuk anggaran belanja modal, belanja barang dan jasa tidak ada penambahan dan pengurangan. Walaupun dalam kondisi Pandemi Covid 19 peningkatan pelayanan bagi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan. Namun walaupun pencapaian kinerja dapat dicapai dengan kategori **Sangat Baik** masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi dan dimonitoring secara bertahap, sehingga pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan ditahun berikutnya. Adapun rencana yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik
2. Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pembangunan Drive THRU Perizinan
3. Melakukan inovasi kerjasama investasi melalui Forum Investor di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten
4. Peningkatan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring baik tenaga kerja lokal dan utamanya bagi para tenaga kerja asing.
5. Peningkatan kerjasama dengan pihak perbankan dan BUMN serta BUMD melalui CSR
6. Melakukan evaluasi bagi Tim Percepatan Investasi
7. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang.
8. Memberikan Reward bagi para pengusaha yang taat memasukkan Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM)
9. Memberikan Reward dan punishment bagi ASN yang berprestasi.
10. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis
11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan.
12. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

13. Peningkatan proses pelaksanaan perencanaan, promosi, kerjasama dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 pada 4 (empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja, Adapun evaluasi pelaksanaan pencapaian RANHIR tahun 2022 diuraikan pada penjelasan di bawah:

a. Sasaran strategis 1 (pertama) Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja yang terdiri dari indikator Nilai LKjIP dengan target 73,5 (BB) rencana realisasinya 73,5 atau capaiannya 100% dan Nilai RB dengan target 73,5 rencana realisasinya 73,5 atau capaiannya 100 % adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang jumlah total anggarannya Rp. 4.680.614.009 dan terealisasi sebesar Rp. 4.547.097.810,00 atau capaiannya 97,15 % dengan sumber dana DAU yang terdiri dari 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang jumlah total anggarannya Rp.30.345.000 realisasinya Rp. 29.946.900 atau capaiannya 98,69%, dengan sumber dana DAU yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang jumlah total anggarannya Rp. 2.977.043.009,00 realisasinya Rp.2.861.088.180,00 atau capaiannya 96,11% dengan sumber dana DAU yang terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan

SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD,3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang jumlah total anggarannya Rp. **12.900.000** realisasinya Rp. **12.900.000** atau capaiannya 100% dengan sumber dana DAU yang terdiri dari Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD,4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang jumlah total anggarannya Rp. **94.475.000** realisasinya Rp. **94.348.348** atau capaiannya 99,87% dengan sumber dana DAU yang terdiri 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah total anggarannya Rp. **261.060.000** realisasinya Rp. **260.940.473** atau capaiannya 99,95% dengan sumber dana DAU yang terdiri 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah total anggarannya Rp. **310.750.000** realisasinya Rp. **307.575.000** atau capaiannya 98,98% yang terdiri 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah total anggarannya Rp. **325.871.700** realisasinya Rp. **321.369.123** atau capaiannya 98,63% dengan sumber dana DAU yang terdiri 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah total anggarannya Rp. **164.737.300** realisasi Rp. **156.873.286** atau capaiannya 95,23% dengan sumber dana DAU

yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- b. Sasaran strategis 2 (Kedua) yaitu** Meningkatnya aspek legalitas perizinan **melalui indikator kinerja** pertama yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) capaiannya 94,86% Adapun program dan kegiatan penunjang sehingga target dapat terealisasi yaitu dengan 1) Program Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp.175.130.000 realisasi anggaran Rp. 173.063.200 dengan capaian 98,82% dengan sumber dana DAU dan indikator kinerja yang kedua yaitu Jumlah Investasi PMDN dan PMA yang melalui indikator Perizinan Usaha target 2700 proyek realisasinya 7.110 proyek capaiannya 263% dan Perizinan Non Usaha dengan target 1740 proyek realisasinya 2.118 proyek yang capaiannya 122%. Adapun program dan kegiatan penunjang sehingga target dapat terealisasi yaitu dengan 1) Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang jumlah total anggarannya Rp. **219.094.000** realisasinya Rp. 218.822.900 atau capaiannya 99,88% dengan sumber dana DAU dan Sub Keegiatannya yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan rata-rata capaiannya 99,95%,
- c. Sasaran strategis yang 3 (ketiga) yaitu Meningkatnya Penanaman Modal** melalui indikator Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri target 2239 proyek realisasinya 7110 proyek capaiannya 318% dan Jumlah Proyek Penanamn Modal Asing (PMA) dari target 6 proyek realisasinya 6 proyek capaiannya 100% dengan yang Program Promosi dengan Kegiatan

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp Rp.248.435.000 dengan realisasi anggaran Rp.248.195.400,00 atau capaiannya 99,90 % dengan sumber Dana DAU Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp.64.040.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 63.773.600 capaiannya 99,58% melalui Dana Alokasi Umum (DAU).dengan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.64.040.000 dengan realisasi anggaranx Rp.63.733.600 dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota. serta Indikator Jumlah Tenaga Kerja dengan target 2239 orang realisasinya 5514 orang capaiannya 246% pencapaian target melalui Program Promosi Penanaman Modal dengan membutuhkan anggaran pokok Rp. 248.435.000 dengan realisasi anggaran Rp.248.195.400,00 atau capaiannya 99,90 % dan dan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran Rp.64.040.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 63.773.600 capaiannya 99,58% dengan Dana Alokasi Umum.

- d. **Sasaran strategis yang 4 (keempat) yaitu Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal** melalui indikator pertama yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) dengan target RP. 1.944.822.870.453 realisasinya Rp.1.960.896.944.773 capaiannya 100% dan Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) target US\$ 144.661.327 realisasi US\$ 21.839.167 capaiannya 15,10% tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan penunjang sehingga target dapat terealisasi yaitu dengan 1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan penunjang sehingga target dapat terealisasi yaitu dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran Rp. 44.110 000 realisasi anggarannya Rp. 38.460 000 capaiannya 87,19 % dengan sumber

dana DAU dan DAK Non Fisik, yang terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal .

Adapun rencana yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Peningkatan layanan dan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik.
2. Melakukan inovasi kerjasama investasi melalui Pinrang Investment Forum di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten.
3. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang.
4. Memberikan Reward bagi para pengusaha yang taat memasukkan Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM).
5. Memberikan Reward dan punishment bagi ASN yang berprestasi.
6. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan.
8. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
9. Peningkatan proses pelaksanaan perencanaan,promosi,kerjasama dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
10. pengendalian pelaksanaan perizinan usaha melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring baik tenaga kerja lokal dan utamanya bagi para tenaga kerja asing.
11. Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service,Jemput Bola dan One Day Service.

Tabel Target Kinerja Capaian Program dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2022 (n-2) dan tahun 2023 (n-1) dan Capaian RENSTRA dapat dilihat dalam table TC.29 berikut ini.

Tabel TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2022 – 2023

Kode	Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)_Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (2023)			Ket.		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi%	Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (Tri.I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
2	18												
		SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN											
2	18	01											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100		%	100 %	50 %	50 %		
2	18	01	01										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11 Dokumen	100%	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	100 %		
2	18	01	01	1									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	1 Dokumen	25 %
2	18	01	01	2									
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD			Jumlah Dokumen RKA Tahun 2024	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	-
2	18	01	01	3									
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA - SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA 2023	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	-
2	18	01	01	4									
		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD			Jumlah Dokumen DPA 2024	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	-
2	18	01	01	5									
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA 2023	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	-
2	18	01	01	6									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen LKJIP, LPPD, SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00 %

2	18	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan		100%				100 %	100 %	18,64 %	
2	18	01	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	100%	14 Bulan	14 Bulan	100	14 Bulan	1 Bulan	7,14 %	
2	18	01	02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, kegiatan makan minum, pengandaan/fotocopy, cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	7 item	100%	7 item	7 item	100	7 item	2 item	28,57 %	
2	18	01	02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	18 jasa	100%	18 jasa	18 jasa	100	18 jasa	18 jasa	24,35 %	
2	18	01	02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	51,06 %	
2	18	01	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	0,00 %	
2	18	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD		100%				100 %	100 %	16,28 %	
2	18	01	03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100	2 orang	2 orang	16,28 %	
2	18	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	56,36 %	
2	18	01	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga	137 Pasang	100%	137 Pasang	137 Pasang	100	136 Pasang	136 Pasang	100,00 %	
2	18	01	05	3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	8 kegiatan	100%	8 kegiatan	8 kegiatan	100	7 kegiatan	3 kegiatan	35,00 %	

01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	4 laporan	100%	3 laporan	4 laporan	133	4 laporan	2 laporan	60,00 %	
01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	9,80 %	
01	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar bateray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	4 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	0	
01	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	8 jenis barang	100%	8 jenis barang	8 jenis barang	100	7 jenis barang	7 jenis barang	0	
01	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	55 Kali	100%	50 Kali	50 Kali	100	50 Kali	50 Kali	13,01 %	
01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan	12 jenis paket pekerjaan	100%	9 jenis paket pekerjaan	9 jenis paket pekerjaan	100	9 jenis paket pekerjaan	0	0	
01	07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel sesuai analisa kebutuhan	5 jenis barang	100%	5 jenis barang	5 jenis barang	100	4 jenis barang	0	0	
01	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	5 jenis barang	100%	4 jenis barang	4 jenis barang	100	4 jenis barang	0	0	
01	07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	2 paket pekerjaan	100%	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	100	1 paket pekerjaan	0	0	

01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100%		100%	100%		100%	100 %	100 %	20,38 %	
01	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, Internet, SMS dan listrik	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	1 jenis		25 %	
01	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	1 jenis		20 %	
01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan		100%				3 kendaraan dinas	1 kendaraan dinas		20,38 %	
01	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan, jasa sopir, jasa service, suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu	4 kendaraan dinas	100%	3 kendaraan dinas	3 kendaraan dinas	100	3 kendaraan dinas	1 kendaraan dinas		33,33 %	
01	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	4 jenis barang	100%	2 jenis barang	2 jenis barang	100	2 jenis barang	2 jenis barang		50 %	
01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	3 paket pekerjaan	100%	3 paket pekerjaan	3 paket pekerjaan	100	0 paket pekerjaan	0		0	

02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal	Proyek Proyek PMA PMDN 6 2239	100%	Proyek Proyek PMA PMDN 6 2239	Proyek Proyek PMA PMDN 6 7110	318% PMDN dan 100% PMA	Proyek Proyek PMDN 2351 PMA 6	Proyek Proyek PMA 1 PMDN 120	Proyek PMDN Proyek PMA 48,59% 16,67%	25,01
02	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi Investasi daerah	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	
02	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	1 paket pekerjaan	100%	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	100	2 Paket pekerjaan	0	0	
03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	5,76 %	100%	5,76 %	5,76 %	5,76	4,76 %	2,56 %	44,44 %	
03	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %		
03	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50 %	
03	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Invetasi Pekan Raya Sul Sel,Sulsel Expo,Pinrang Expo,FIP)	4 Kali	100%	4 Kali	2 Kali	50%	1 Kali	0 Kali	0 %	
04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Perizinan Usaha Non Usaha 2700 1740	100%	Perizinan Usaha Non Usaha 2700 1740	Perizinan Usaha Non Usaha 7110 2118	Perizinan Usaha 263% Pewrizinan Non Usaha 122%	- Perizinan - Perizinan Usaha 2900 Non Usaha - 1800	Perizinan Perizinan Non Usaha 175 Usaha 27	Perizinan Usaha 5,65% Perizinan Non Usaha 1,29%	
04	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan perizinan penanaman modal yang akuntabel	100 %	100%	100 %	100 %		100 %	100 %	75 %	
04	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33 %	

Nilai Investasi PMDN dan PMA	PMDN: 2.144.167.214.674 PMA: \$ 159.489.113	PMDN 1.764.011.673.8 80 PMA \$ 131.212.088	PMDN: 1.944.822.870.453 PMA: \$ 144.661.327	PMDN: 1.960.896.944.773 PMA: \$ 21.839.167	100% dan 15,10%	- PMDN: Rp. 2.042.064.013.975 - PMA: \$ 144.661.327	PMDN: Rp. 236.205.717.613 PMA: \$ 12.165.332	PMDN: 11,02% dan PMA 7,63%	
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %	
Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal	4 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100	2 kegiatan	1 kegiatan	25 %	
Jumlah laporan LKPM, SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan dan Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	8 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	1 kegiatan	33 %	
Jumlah pengawasan dan laporan evaluasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan berusaha PMDN dan PMA	5 kegiatan	100%	7 kegiatan	7 kegiatan	100	4 kegiatan	1 kegiatan	20 %	
Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM)	Indeks 86,00 SKM	100%	Indeks 85,00 SKM	Indeks 94,86 SKM	112	Indeks SKM 86,00	Indeks 0,00 SKM	0,00 %	
Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	45 %	45,00 %	
Jumlah aplikasi berbasis IT dan pengelolaan data informasi	4 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	1 kegiatan	33 %	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah dalam peningkatan daya saing investasi secara nasional yang implementasinya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara nasional.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pengusaha regional, nasional, dan internasional dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan realisasi investasi, iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, DPMPTSP Kabupaten Pinrang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal serta perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Pinrang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah:

1. Peningkatan layanan dan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik.
2. Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
3. Pelaksanaan perencanaan, promosi, kerjasama dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
4. Pelaksanaan perizinan usaha melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring baik tenaga kerja lokal dan utamanya bagi para tenaga kerja asing.
5. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput Bola dan One Day Service.
6. Melakukan inovasi kerjasama investasi melalui Pinrang Investment Forum di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
7. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang.
8. Memberikan Reward bagi para pengusaha yang taat memasukkan Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM).
9. Memberikan Reward dan punishment bagi ASN yang berprestasi.
10. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis
11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan.
12. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan database berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2022

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(12)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP	IKU		73	73,5	74	74,5	73,5	74	73,5	74	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	IKU		73	73,5	74	74,5	73,5	74	73,5	74	
1.	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggabungan Yang Disusun			11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	
1.2	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENJA			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
1.3	Jumlah Dokumen RKA			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.4	Jumlah Dokumen Perubahan RKA			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.5	Jumlah Dokumen DPA			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.6	Jumlah Dokumen Perubahan DPA			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.7	Jumlah Dokumen LKJIP, LPPD, SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	

2.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.1	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	
2.2	Jumlah ATK, kegiatan makan minum, pengandaan/fotocopy, cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		7 item	7 item	7 item	7 item	7 item	7 item	7 item	7 item	
2.3	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu		18 jasa	18 jasa	18 jasa	18 jasa	18 jasa	18 jasa	18 jasa	18 jasa	
2.4	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
2.5	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
3.	Persentase penyusunan laporan SKPD		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3.1	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	
3.2	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3.3	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga		136 Pasang	137 Pasang	138 Pasang	139 Pasang	137 Pasang	137 Pasang	137 Pasang	137 Pasang	

3.4	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu			7 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	
3.5	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan			3 laporan	4 laporan	4 laporan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
4.	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan			5 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	
4.1	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar baterai kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
4.2	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan			7 jenis barang	8 jenis barang	9 jenis barang	10 jenis barang	8 jenis barang	8 jenis barang	8 jenis barang	8 jenis barang	
4.3	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan dibayarkan tepat waktu			50 Kali	55 Kali	60 Kali	65 Kali	55 Kali	55 Kali	55 Kali	55 Kali	
4.4	Jumlah pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan			5 jenis barang	5 jenis barang	6 jenis barang	6 jenis barang	6 jenis barang	6 jenis barang	6 jenis barang	6 jenis barang	
4.5	Jumlah meubeleur kantor sesuai analisa kebutuhan			4 jenis barang	5 jenis barang	6 jenis barang	7 jenis barang	5 jenis barang	5 jenis barang	5 jenis barang	5 jenis barang	

4.6	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan			4 jenis barang	5 jenis barang	6 jenis barang	7 jenis barang	5 jenis barang	5 jenis barang	5 jenis barang	5 jenis barang	
4.7	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	IKU		1 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	3 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	
5.	Persentase jasa pelayanan umum kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5.1	Jumlah rekening telepon, Internet, SMS dan listrik			4 rekening	4 rekening	4 rekening	4 d	4 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening	
5.2	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu			5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	
5.3	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan			8 jenis barang	10 jenis barang	11 jenis barang	13 jenis barang	10 jenis barang	10 jenis barang	10 jenis barang	10 jenis barang	
5.4	Jumlah jasa penyediaan perizinan, jasa sopir, jasa service, suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu			3 kendaraan dinas	4 kendaraan dinas	4 kendaraan dinas	4 kendaraan dinas	4 kendaraan dinas	4 kendaraan dinas	4 kendaraan dinas	4 kendaraan dinas	
5.5	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	IKK		4 jenis barang	4 jenis barang	5 jenis barang	6 jenis barang	4 jenis barang	4 jenis barang	4 jenis barang	4 jenis barang	
5.6	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	IKK		2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	3 paket pekerjaan	3 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	

6.	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal			PMDN : 2133	PMA : 5	Proyek Proyek PMA PMDN 2239 6	PMDN : 2351	PMA : 6	PMDN : 2469	PMA : 6	PMDN : 15.324	PMA : 6	PMDN : 2450	PMA : 6	PMDN : 15.324	PMA : 6	PMDN : 15.324	PMA : 6	
6.1	Tersedianya Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi			1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	
6.2	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi			1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	2 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	
7.	Persentase Wirausaha yang memanfaatkan Layanan Perizinan	IKU		93%	94%	94%	95%	96%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	
7.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten			5,85 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	5,76 %	
7.2	Jumlah Buku dan Brosur Investasi			2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
8.	Jumlah penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			4 kali	4 kali	4 kali	1 kali	4 kali	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	
8.1	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Invetasi Pekan Raya Sul Sel,Sulsel Expo,Pinrang Expo,FIP)			4 Kali	4 Kali	4 Kali	5 Kali	5 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	4 Kali	4 Kali	

9.	Jumlah Investasi PMDN dan PMA			Perizinan Perizinan Usaha 2500 Non Usaha 1420	Perizinan Perizinan Usaha 2700 Non Usaha 1740	Perizinan Perizinan Usaha 2900 Non Usaha - 1800	Perizinan Perizinan Usaha 3100 Non Usaha - 2100	Perizinan Perizinan Usaha 7110 Non Usaha 2118	Perizinan Perizinan Usaha 7500 Non Usaha 2500	Perizinan Perizinan Usaha 7800 Non Usaha 2700	Perizinan Perizinan Usaha 7800 Non Usaha 2700	
9.1	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan perizinan penanaman modal yang akuntabel			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9.2	Jumlah Updating dan Pemeliharaan Aplikasi			2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
9.3	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal			4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	
9.4	Jumlah laporan layanan perizinan usaha dan usaha PM secara berkala			4 laporan	5 laporan	6 laporan	7 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	
9.5	Jumlah kegiatan one day service, Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan			5 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	
10.	Nilai Investasi PMDN dan PMA			PMDN: Rp. 1.852.212.257.574 dan \$ 137.772.692	PMDN: 1.944.822.870.453 PMA: \$ 144.661.327	- PMDN: 1.944.822.870.453 - PMA: \$ 144.661.327	- PMDN: 1.944.822.870.453 - PMA: \$ 144.661.327	PMDN: 1.960.896.944.773 PMA: \$ 21.839.167	Rp. 1.970.996.9500.775 dan \$ 145.661.327	PMDN: 1.960.896.944.773 PMA: \$ 147.661327	PMDN: 1.970.896.944.773 PMA: \$ 148.661327	
10.1	Tertaksananya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal			14 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	5 Kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	

10.2	Jumlah Sosialisasi LKPM Online, perizinan bangunan gedung dan FIP			3 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
10.3	Jumlah laporan LKPM, SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan			7 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
10.4	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM, perizinan usaha secara OSS, Bimtek RAJIN dan Satgas Percepatan Investasi			4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
11.	Jumlah IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	IKU		85	85	86	86	94,86	95	94,86	95
11.1	Jumlah tenaga kerja	IKK		2.133	2.239	2.351	2.469	5.514	2.379	2.379	2.379
11.2	Tersedianya aplikasi berbasis IT dan pengelolaan data informasi			3 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
11.3	Jumlah kegiatan digitalisasi arsip perizinan usaha dan non usaha PM			3 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi perangkat daerah

- 1) Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah terkait Pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pinrang. Sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan. Strategis dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pengembangan /Upgrading Aplikasi SIAP BOSS, dibentuknya Satgas Percepatan realisasi LKPM yang melibatkan semua bidang di Dinas PMPTSP dan lintas SKPD, lanjutan pelaksanaan forum Investasi bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten, Penyederhanaan regulasi investasi penanaman modal, peningkatan kompetensi melalui Diklat/pelatihanyang mengacu pada aktivitas unit layanan per bidang, kegiatan monitoring dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan. Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dan Kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sudah bersinergi dengan mengacu kepada Visi Kementerian Investasi/BKPM yaitu visi BKPM adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Misi PTSP Provinsi yaitu Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi dan kerjasama dalam peningkatan kemakmuran ekonomi dan adanya kegiatan Forum SKPD yang dilakukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat provinsi yang diadakan setiap tahun.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah

Tabel.2.1

Permasalahan/hambatan yang dihadapiserta tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022

TABEL CAPAIAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT RKPD DINAS PMPTSP PINRANG					
NO	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN /HAMBATAN	TINDAK LANJUT		
	PENANAMAN MODAL				
1.	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN /KOTA	Birokrasi perizinan berusaha yang terlalu panjang, waktu yang tidak sedikit, biaya dan ditambah banyaknya pihak ketiga tak resmi, membuat investor pikir-pikir untuk menanamkan modal	1	Mensosialisasi Perizinan OSS RAB sesuai PP 5 tahun 2021.	
			2	Masih banyak kewenangan perizinan diambil alih oleh pusat sehingga di daerah belum bisa mengakomodir di sistem yang ada	
			3	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan yang belum melakukan Imigrasi dari OSS Ver 1.1 ke OSS RBA	
			4	Lebih mengoptimalkan pelayanan di Desa dan Kelurahan melalui Gerai Perijinan	
			5	Melakukan Sosialisasi di Media Online dan Media lainnya untuk menghindari Pihak Ketiga/calor dalam pengurusan perizinan.	
			Sistem Perizinan Non Berusaha belum diterapkan secara Online sehingga masih banyak masyarakat datang langsung bertatap muka di DPMPTSP Kab.Pinrang	1.	Mengupdate system semi online ke Online full
				2.	Mensosialisasikan ke masyarakat penggunaan system online
	Pengurusan PBG terlalu lama dan Biaya yang tinggi	1	Membentukan Asosiasi Arsitek Indonesia (AAI) yang terpusat di Mal Pelayanan Publik		
		2	Penyederhanaan persyaratan PBG		

- 3) Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pinrang adalah dengan mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima serta pemanfaatan teknologi dan informasi dengan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance) serta peningkatan pelayanan publik yaitu dengan tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pinrang yang dilakukan disatu tempat, mudah, cepat dan terintegrasi. Mal Pelayanan Publik ini dibentuk untuk mendorong fundamental aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat dan memberi kemudahan serta pemberian layanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan maupun non perizinan tanpa melalui sistem birokrasi yang bertele-tele. Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Pinrang adalah salah satu jawaban dan manivestasi atas reformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik. Kehadiran MPP ini adalah jawaban atas kritik Presiden yang menyebutkan bahwa Birokrasi dalam hal pelayanan publik cenderung kaku dan terjebak dalam hal yang berbau prosedural dan administrative. Dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik diharapkan dapat menghilangkan kekakuan koordinasi dan ego sektoral antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta bisa membangun kerjasama membangun budaya melayani.
- 4) Dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang yaitu mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi kebijakan pelayanan dengan penerapan "**Paket Kebijakan Investasi**" (PAKSI) sebagai upaya pemberian kemudahan bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang dan aplikasi perizinan berbasis OSS (Online Single Submission) atau SIAP BOSS merupakan inovasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dalam rangka Pelayanan perizinan nantinya mulai pendaftaran dan kelengkapan surat pedaftaran telah dilakukan dalam

sistem online warga tidak harus datang lagi ke kantor bolak balik untuk mengurus, aplikasi “**RAJIN**” adalah Gerai Perizinan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa, melakukan Forum Investasi bagi pengusaha lokal maupun di luar Kabupaten Pinrang dalam menjalin kerjasama disegala bidang dengan memberikan kemudahan, fasilitasi dan kerjasama di bidang investasi melalui **FIP (Forum Investasi Pinrang)**. Pengurusan dan pendaftaran izin sudah dapat diakses melalui jaringan internet dengan menggunakan aplikasi **SIAPBOSS**. **KONGSI** adalah Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasinya serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan SDM kapital dan teknikal dalam pengembangan usaha sedangkan tujuannya adalah mengkolaborasikan potensi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. **JABAT ERAT** merupakan kerjasama antara Investor PMDN dan PMA dengan Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM). Dan tersedianya Buku Prospektus yang merupakan dokumen berisi tentang Data Investasi dan peluang investasi di Kabupaten Pinrang yang bertujuan memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang

- 5) Implementasi e–Government dalam rangka peningkatan layanan public melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah melakukan sinkronisasi aplikasi OSS dengan Aplikasi SILEMPUE, yang didukung oleh Aplikasi **Tracking System** yaitu aplikasi yang terintegrasi mulai dari front office, back office hingga terbitnya izin melalui sistem jaringan, aplikasi **SMS Gateway** adalah layanan aplikasi yang secara langsung menyampaikan SMS ke Handphone yang berbasis android kepada pemohon bahwa posisi izinnya sudah diproses, **Aplikasi Digital Files** adalah aplikasi yang memudahkan dalam proses pengarsipan izin. Keberadaan Dinas PMPTSP merupakan suatu kebijakan

daerah di bidang penanaman modal yang sangat besar, dimana tidak ada lagi resistensi antara SKPD teknis dan lebih efektif menjalankan kebijakan di bidang penanaman modal serta adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Kepala Dinas PMPTSP terkait penerbitan izin. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal daerah yang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan di bidang penanaman modal serta pemberian insentif dan kemudahan daerah. Adapun capaian realisasi PMD tahun 2019-2022 nilai rata-ratanya 133% dan Penanaman Modal Asing (PMA) capaiannya pada tahun 2019-2022 nilai rata-ratanya 143 %, dan meningkatnya investor/proyek PMDN pada tahun 2019-2022 nilai rata-rata capaiannya adalah 185% dan PMA capaiannya pada tahun 2019-2022 nilai rata-ratanya 133%, serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usahanya dengan membuat dan mengurus sendiri izinya tanpa melalui CALO.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan visi dan misi Bupati terkait program prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada Tabel 2.5. program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD yang direncanakan merupakan rancangan yang sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dan telah dikondisikan dengan laporan evaluasi dan monitoring tahun sebelumnya atau n-1 atau tahun 2023 yaitu terdiri dari 6 (enam) Program dengan 13 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.819.071.042 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel TC-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas PMPTSP Pinrang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.644.094.805	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.644.094.805	
	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			55.625.000	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			55.625.000	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja 2023	2 Dokumen	10.540.000	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja 2023	2 Dokumen	10.540.000	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		Jumlah Dokumen RKA Tahun 2023	1 Dokumen	4.890.000	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		Jumlah Dokumen RKA Tahun 2023	1 Dokumen	4.890.000	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA 2022	1 Dokumen	5.265.000	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA 2022	1 Dokumen	5.265.000	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD		Jumlah Dokumen DPA 2023	1 Dokumen	5.140.000	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD		Jumlah Dokumen DPA 2023	1 Dokumen	5.140.000	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA 2022	1 Dokumen	5.640.000	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA 2022	1 Dokumen	5.640.000	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKjIP, LPPD, SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	6 Dokumen	24.150.000	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKjIP, LPPD, SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	6 Dokumen	24.150.000	

	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			4.324.228.405	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			4.324.228.405
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bul	3.397.843.405	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bul	3.397.843.405	
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 item	425.258.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 item	425.258.000	
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Jasa	481.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Jasa	481.800.000	
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	5.607.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	5.607.000	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.540.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	8.540.000	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	4 Laporan	5.180.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	4 Laporan	5.180.000	
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			13.500.000	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			13.500.000
	1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 Orang	13.500.000	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan	2 Orang	13.500.000	

	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			145.455.000	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			145.455.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	137 Pasang	13.800.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	137 Pasang	13.800.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Kegiatan	6.655.000	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Kegiatan	6.655.000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	6 Bimtek	125.000.000	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	6 Bimtek	125.000.000
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			198.580.000	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			198.580.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Jenis Barang	13.580.000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Jenis Barang	13.580.000
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	175.000.000	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	55 Laporan	175.000.000
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			490.200.000	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			490.200.000
1	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Jenis Barang	21.000.000	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Jenis Barang	21.000.000

	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis Barang	363.600.000	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis Barang	363.600.000	
	3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket pekerjaan	105.600.000	3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket pekerjaan	105.600.000	
	f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			133.805.000	f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			133.805.000	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rekening	100.920.000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 Rekening	100.920.000	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Jenis	32.885.000	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	5 Jenis	32.885.000	
	g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			282.701.400	g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			282.701.400	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	3 Kendaraan Dinas	80.501.400	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	3 Kendaraan Dinas	80.501.400	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis Barang	36.000.000	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis Barang	36.000.000	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Paket pekerjaan	166.200.000	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Paket pekerjaan	166.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.176.307.805	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.719.548.805	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.532.213.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.075.454.000	
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				66.040.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				66.040.000	
	a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto			66.040.000	a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto			66.040.000	
	1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	66.040.000	1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	66.040.000	
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				669.500.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				489.925.000	
	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto			669.500.000	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto			489.925.000	
	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	19.500.000	1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	43.300.000	
	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	650.000.000	2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	446.625.000	

3.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				292.900.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				273.636.000	
	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto			292.900.000	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			273.636.000	
	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 Non Usaha 2900 pelaku usaha	39.000.000	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 Non Usaha 2900 pelaku usaha	189.336.000	
	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	5 Kegiatan Usaha	39.000.000	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	5 Kegiatan Usaha	84.300.000	
	3 Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan		Jumlah permasalahan perusahaan PMA dan PMDN yang ditindaklanjuti serta aplikasi pengaduan permasalahan pelaksanaan PM	5 laporan	19.900.000						
	4 Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/Intensif daerah		Jumlah kegiatan one day service, Film Pendek dan jemput bola serta cetak brosur layanan		195.000.000						
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				373.773.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				49.700.000	
	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto			373.773.000	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto			49.700.000	

	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal	2042064013975 PMDN	39.000.000		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	2.042.064.013.975 PMDN	49.700.000	
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah laporan LKPM, SKM dan kebijakan PM serta pelayanan perizinan dan jumlah perjalanan dinas dalam daerah		273.233.000		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM, LKPM Online, perizinan bangunan gedung dan FIP, Perizinan usaha secara OSS, Bimtek Tajin dan Satgas Percepatan		61.540.000		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
	5.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				130.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				196.153.000	
	a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto			130.000.000		a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto			196.153.000	
	1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	130.000.000		1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	196.153.000	

2.5 Penelaahan Dokumen Perencanaan Bidang Teknis Terkait adalah :

- Dalam **peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait usulan** program dan kegiatan terkait Bidang teknis di Dinas Penanaman dan PTSP melalui **Sasaran ke-2 yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat** Atas Pelayanan Publik yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal penelaahannya berkitan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui program Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sekretariat Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Perbatasan,dan Di Kecamatan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- **Program untuk Sasaran ke-8 Meningkatnya lapangan kerja/usaha Indikator : Tingkat pengangguran terbuka di Dinas Penanaman Modal dan PTSP** melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terkait dengan **Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral** melalui Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting,Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** melalui Program Perencanaan Tenaga Kerja Melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program

Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** melalui Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM).

2.6 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang tidak ada usulan dari pelayanan provinsi, LSM dan asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah provinsi serta usulan Musrenbang kabupaten/kota.

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pinrang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN PINRANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Renstra BKPM Tahun 2020-2024.sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024.

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati

kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran RANHIR Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rumusan misi RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) uraiannya sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ini mencakup upaya pokok ***mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).***

a) Tujuan

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).

b) Sasaran

- 1) Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja
- 2) Meningkatnya aspek legalitas perizinan

2. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, ***pengembangan investasi yang atraktif***, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan

dan kebutuhan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

a) Tujuan

1) Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah

b) Sasaran

1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

2) Meningkatnya penanaman modal

Berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan 2019-2024, diatas maka faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program tersebut yan dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi: . Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>M.1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Manusia Aparatur</p> <p>5. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik - Masih kurangnya SDM yang handal dibidang IT dan terbatasnya jaringan Internet - Masih kurangnya evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan SDM setiap unit tidak sama sehingga membutuhkan kompetensi yang berbeda. - Jumlah Staf dan sarana tidak sebanding dengan jumlah layanan yang tersedia. - Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal; 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana dan prasarana - Peningkatan SDM melalui Bimtek dan pelatihan - Ketersediaan anggaran peningkatan pelayanan perizinan - Penerapan Paket Kebijakan

	6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya layanan ke masyarakat yang berbasis online/aplikasi - Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah - Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Pinrang belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi - Pembentukan satgas percepatn berusaha - Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan
2	<p>M.4 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 2. Program pengembangan iklim penanaman modal 3. Program promosi penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan promosi - Belum optimalnya pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanaman modal di daerah - Kurangnya pelaksanaan fungsi Pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaku usaha 		

Adapun Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas PMPTSP
Kabupaten Pinrang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan
1.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai LkjIP	74,5	Indeks
		Nilai Reformasi Birokrasi	74,5	Indeks
2.	Meningkatnya aspek legalitas perizinan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM) perizinan	86	Indeks
3.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	Rp. 2.144.167.214.674	Rupiah
		Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	PMA: \$ 159.489.113	US\$ Dollar
4.	Meningkatnya penanaman modal	Jumlah Proyek PMDN	2.469	Proyek
		Jumlah Proyek PMA	6	Proyek

Analisis gender adalah suatu informasi untuk menjamin manfaat dan sumberdaya pembangunan secara efektif dan adil ditujukan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Sehingga analisis gender bermanfaat untuk memberi dasar dalam melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan tata kehidupan baru yang lebih baik, melalui relasi sosial baru yang lebih adil. Hal ini dirasa perlu karena masih kentalnya permasalahan gender yang terjadi dalam suatu masyarakat dikarenakan Sistem sosial budaya yang masih menganut budaya patriarki dimana laki-laki masih dianggap lebih unggul dari perempuan karena faktor fisik yang lebih kuat, kemudian tingkat pendidikan masyarakat yang rendah

sehingga masih berorientasi pada adat istiadat yang kuat seperti perempuan. Oleh karena itu untuk merespon isu kesetaraan gender ini maka pemerintah membuat Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki . dimana kita perlu memperjuangkan keseimbangan gender untuk kepentingan kedua gender, menegakkan keadilan bagi kedua gender serta memberikan kesempatan pada kedua gender untuk berkembang sesuai dengan minat dan keahliannya secara proporsional.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terakit dengan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Kegiatan

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan

1.1.2 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Administrasi Umum

1.1.3 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- m. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- n. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- o. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- p. Pengadaan Mebeleur
- q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- u. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya

1.1.4 Sub Kegiatan

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2.1 Kegiatan

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.1.2 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

3.1 Kegiatan

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

4.1 Kegiatan

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

4.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1 Kegiatan

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1 Kegiatan

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Sub Kegiatan

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dari uraian tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pinrang merencanakan 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Lokasi Program dan kegiatan terkait kegiatan pembinaan penanaman penanaman modal (Bimtek bagi pengusaha) di Kecamatan Watang Sawitto dan sebagian tersebar di 12 kecamatan dalam rangka pengawasan dan pemantauan perizinan usaha penanaman modal dan kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan realisasi Penanaman Modal. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp. 1.077.200.000 yang terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) Sub Kegiatan sumber pendanaannya Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Senilai Rp. 30.000.000 yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan sumber pendanaannya Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Program Promosi Penanaman Modal Senilai Rp. 320,000,000 yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sumber pendanaannya dari Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Program Pelayanan Penanaman Modal senilai Rp. 157,000,000 yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan sumber pendanaannya dari Dana Alokasi Umum (DAU)
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal senilai Rp. 438.200,000,000 yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan sumber pendanaannya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal senilai Rp. 132,000,000 yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan sumber pendanaannya dari Dana Alokasi Umum (DAU).

3	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMPN dan PMA Persentase Peningkatan				4,76 % 4,76 %	157.000.000,00						329.000.000,00		
	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perizinan Penanaman Modal Yang Akuntabel				100 %	157.000.000,00						329.000.000,00		
	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha				2950 Pelaku Usaha	125.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi Digital.		155.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal													
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				6 Kegiatan Usaha	32.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi		34.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan													
						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat				0 Orang	0,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi Digital.		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian				0 Kegiatan Usaha	0,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi Digital.		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal				2.144.167.214.674 PMDN	438.200.000,00						478.200.000,00		
	2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				10 Kegiatan	438.200.000,00				3. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang Inklusif.		478.200.000,00		

2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal													
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan					7 Kegiatan Usaha.	325.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang Inklusif.		353.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal													
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					204 Pelaku Usaha	28.200.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang Inklusif.		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal													
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					10 Kegiatan Usaha	85.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang Inklusif.		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan				95 % 86 Indeks SKM	132.000.000,00						150.000.000,00	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada				100 %	132.000.000,00			-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi		150.000.000,00	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,					5 Dokumen	132.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi Digital.		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Renja DPMP TSP Tahun 2024
Kabupaten Pinrang

X					-				4.041.522.071,00							4.801.070.000,00		
X	XX				-				4.041.522.071,00								4.801.070.000,00	
6	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	4.041.522.071,00							4.801.070.000,00	
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun			6 Dokumen	35.635.000,00				-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi		39.199.000,00	
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	4.862.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi		5.348.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	4.587.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi		5.046.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	4.835.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi		5.318.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	4.862.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi		5.349.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	5.280.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi		5.808.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	11.209.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi	-		12.330.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan.			100%	3.392.742.071,00				4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi	-		3.795.671.000,00	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	2.605.522.071,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi	-		2.990.871.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	392.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				4 Dokumen	382.520.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi	-		390.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	7.200.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi Digital.	-		8.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				2 Laporan	5.500.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi Digital.	-		6.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan SKPD			100%	12.900.000,00				4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi	-		13.700.000,00	
X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12.900.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi	-		13.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Renja DPMP TSP Tahun 2024
Kabupaten Pinrang

X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6 Unit	33.425.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Umum Kantor				100 %	33.345.000,00			-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi			54.000.000,00				
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	3.345.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai				3 Kendaraan Dinas	149.000.000,00			-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi			271.000.000,00				
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan				3 Unit	58.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi			71.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	41.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Transformasi			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			
J U M L A H											5.118.722.071,00										6.353.270.000,00	

Dalam Rencana Akhir Tahun 2024 terdiri dari 6 Program yaitu 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 8 kegiatan 26 Sub kegiatan, 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, 3. Program Promosi Penanaman Modal terdiri 1 Kegiatan dan dari 2 Sub kegiatan, 4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, 6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Dari uraian tersebut diatas Program dan kegiatan tidak ada yang berubah sesuai dengan rencana kerja awal sedangkan pagu indikatif di Rencana awal yaitu sebesar **Rp. 6.252.729.513** sedangkan di Rencana akhir tahun 2024 pagu indikatifnya senilai **Rp. 5.118.722.071** yang terdiri dari belanja operasional **Rp.2.260.522.071** sedangkan belanja modal **Rp. 133 425 000**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan DPMPSTSP
Kabupaten Pinrang Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome) Sub Kegiatan (Outcome)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah								
MISI 1: Memantapkan Sistem Birokrasi yang Baik dan Akuntabel Serta Berorientasi Pelayanan Prima Dengan Didukung Oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi								
		Nilai SAKIP		74,5			75	
		Nilai Reformasi Birokrasi		74,5			75	
X	XX		SEMUA BIDANG URUSAN		5.118.722.071,00			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.041.522.071,00		
X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun	6 Dokumen	35.635.000,00	
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.862.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.587.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.835.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	4.862.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	5.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Laporan	11.209.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan.		100 %	3.392.742.071,00			
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	37 Orang/bulan	2.605.522.071,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Dokumen	392.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	382.520.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Laporan	7.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Laporan	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan SKPD			100 %	12.900.000,00		
X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Laporan	12.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Disiplin Mematuhi Aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Keterampilannya			100 %	114.475.000,00		
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Paket	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Dokumen	3.975.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	20 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana Sesuai Analisa Kebutuhan			3 paket	170.000.000,00		

X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	25 Laporan	130.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Analisa Kebutuhan		13 Jenis Paket Pekerjaan	133.425.000,00		
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	6 Unit	33.425.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Umum Kantor		100 %	33.345.000,00		
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Laporan	3.345.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Analisa Kebutuhan		3 Kendaraan Dinas	149.000.000,00		
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	3 Unit	58.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Unit	41.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	1 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

M.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Secara Berkelanjutan												
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal		2475 Investasi	30.000.000,00			
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Investasi Daerah		1 Paket Pekerjaan	30.000.000,00			
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota							
						Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten		3100 Perizinan 4,76 %	320.000.000,00			
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		6 Kegiatan 6 Kegiatan	320.000.000,00			
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal							
						Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	4 Dokumen	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
MISI 1: Memantapkan Sistem Birokrasi yang Baik dan Akuntabel Serta Berorientasi Pelayanan Prima Dengan Didukung Oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi												
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMPN dan PMA Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Pinrang		4,76 % 4,76 %	157.000.000,00			
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perizinan Penanaman Modal Yang Akuntabel		100 %	157.000.000,00			
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	2950 Pelaku Usaha	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal							
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	6 Kegiatan Usaha	32.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	0 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	0 Kegiatan Usaha	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
M.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Secara Berkelanjutan											
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal		2.144.167.214.674 PMDN	438.200.000,00		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		10 Kegiatan	438.200.000,00		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	7 Kegiatan Usaha.	325.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	204 Pelaku Usaha	28.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	10 Kegiatan Usaha	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
M.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Secara Berkelanjutan											
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota		95 % 86 Indeks SKM	132.000.000,00		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat/Daerah Kabupaten/Kota		100 %	132.000.000,00		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	- Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	5 Dokumen	132.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
J U M L A H									5.118.722.071,00		

Dalam Rencana Akhir Tahun 2024 terdiri dari 6 Program yaitu 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah **Rp. 4.041.522.071** terdiri dari 8 kegiatan 26 Sub kegiatan, 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah **Rp. 30.000.000** yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, 3. Program Promosi Penanaman Modal adalah **Rp. 320.000.000** terdiri 1 Kegiatan dan dari 2 Sub kegiatan, 4. Program Pelayanan Penanaman Modal adalah **Rp.157.000.000** yang terdiri dari 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah **Rp. 438.000.000** yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, 6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah **Rp 132.000.000** yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Sehingga **total anggaran sebesar Rp. 5.118.722.071 (Lima Milyar Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah)** dan sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB V **PENUTUP**

5.1. Catatan Penting

Rencana Akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pinrang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

RANHIR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan Sumber Daya Manusia di tahun 2024 sangat dibutuhkan penambahan anggaran sehingga peningkatan pelayanan dan keterampilan sumber daya aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat akan lebih meningkat. Dengan demikian Setiap bagian dan bidang akan menyusun rencana dan langkah-langkah persiapan pelaksanaannya sehingga RANHIR PD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 ini dapat diwujudkan secara optimal.

5.2 Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

- a. RANHIR Dinas PMPTSP merupakan rencana tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Tahun 2019-2024.
- b. Kepala Dinas PMPTSP berkewajiban melakukan evaluasi dan memonitoring setiap bagian dan bidang dalam menyusun Renja SKPD Dinas PMPTSP sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMPTSP.
- c. Dinas PMPTSP berkewajiban mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih sesuai tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024.

- d. Merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
- e. Setiap bagian dan bidang dalam menyusun program, kegiatan dan Sub Keegiatannya harus mampu melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan
- f. Sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hasil pelaksanaan kegiatannya mampu memberikan hasil (outcome) yang optimal yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna layanan dan para investor.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas PMPTSP dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Pinrang dalam mencapai tujuan sasaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 maka Dinas PMPTSP telah dan akan melanjutkan beberapa program unggulan yang inovatif dalam peningkatan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Pinrang yaitu:

- **SIAP BOSS** (Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis OSS) yang merupakan system pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan usaha dan non usaha dan telah dilengkapi dengan penandatanganan elektronik (TTE)
- **RAJIN** (Gerai Perizinan) yang merupakan aplikasi perizinan di Tingkat Desa dan Kelurahan terintegrasi dengan System Informasi Perizinan (SIP) DPMPTSP Kabupaten Pinrang.
- **KONGSI** (Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi) Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **PIF** (Pinrang Investment Forum) adalah Forum yang mengusung tema Come Invest in Pinrang atau Collaborative Trough Investment in Pinrang yang bertujuan memberikan berbagai informasi strategis kepada investor

- baik lokal maupun asing mengenal peluang investasi yang dapat dilakukan di Pinrang yang dapat menarik minat investor PMDN dan PMA.
- **JABAT ERAT** (Kerjasama Pembinaan dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan) bertujuan memfasilitasi pelaku usaha mulai dari perizinan
- usaha, peningkatan kualitas produk, fasilitasi bantuan permodalan dan fasilitasi pemasaran produk.
- **PIA (Pemberian Pinrang Investment Award)** Penghargaan kepada para pengusaha yang ada di Kabupaten Pinrang.
- Pengembangan kegiatan **Prospektus Investasi** yaitu kegiatan **Kelender Stok**
- **Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pinrang**
- **Drive THRU Pengambilan Izin**
- Melakukan evaluasi dan memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan di setiap bidang dan bagian, serta peningkatan sarana dan prasarana.

Kepala Dinas



ANDI MIRANI, AP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19740603 199311 2 001